



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 04 TAHUN 2020**

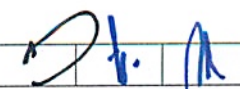
**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA  
DAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA**

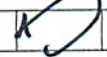


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat, perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2019-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 218);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**Dan**

**BUPATI LAMANDAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA  
DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN SERTIFIKASI USAHA  
PARIWISATA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
16. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
17. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
18. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
19. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata.

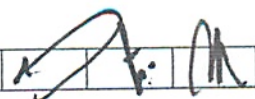
  
[ ]

20. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
21. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
22. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha dibidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
24. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
25. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
26. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

## Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Usaha;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan

  
\_\_\_\_\_

- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

### **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- prosedur pelayanan yang sederhana;
  - persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
  - waktu penyelesaian yang cepat;
  - lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
  - standar pelayanan yang jelas; dan
  - informasi pelayanan yang terbuka.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kepastian pelayanan;
  - kualitas pelayanan;
  - perlindungan konsumen;
  - perlindungan lingkungan sosial, budaya, dan alam setempat; dan
  - prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **BAB II USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Golongan Usaha Pariwisata**

### **Pasal 4**

- (1) Usaha pariwisata yang tergolong:
- usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
  - usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
  - usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria:
- kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria:
- kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

- b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kriteria:
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kriteria:
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

**Bagian Kedua  
Bidang Usaha**

**Pasal 5**

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
- a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha:
- a. daya tarik wisata:
    - 1. pengelolaan museum;
    - 2. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
    - 3. pengelolaan goa;
    - 4. wisata agro;
    - 5. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
    - 6. pengelolaan objek ziarah.
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata:
    - 1. angkutan jalan wisata; dan



2. angkutan wisata di sungai dan danau.
- d. jasa perjalanan wisata:
  1. agen perjalanan wisata; dan
  2. biro perjalanan wisata.
- e. jasa makanan dan minuman:
  1. restoran;
  2. rumah makan;
  3. jasa boga;
  4. pusat penjualan makanan
  5. bar/pub; dan
  6. kafe.
- f. penyediaan akomodasi:
  1. hotel;
  2. pondok wisata;
  3. bumi perkemahan;
  4. vila;
  5. kondominium hotel;
  6. rumah wisata;
  7. jasa manajemen hotel
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
  1. sanggar seni;
  2. jasa impresariat/promotor;
  3. galeri seni;
  4. gedung pertunjukan seni;
  5. rumah bilyar;
  6. lapangan golf;
  7. gelanggang bowling;
  8. gelanggang renang;
  9. lapangan sepak bola/futsal;
  10. lapangan tenis;
  11. wisata olahraga minat khusus;
  12. wisata petualangan alam;
  13. taman bertema;
  14. taman rekreasi;
  15. kelab malam;
  16. diskotik;
  17. karaoke;
  18. arena permainan; dan
  19. panti/rumah pijat.
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta:
  1. wisata arung jeram;
  2. wisata selam;
  3. wisata dayung;
  4. wisata olahraga tirta;
  5. wisata memancing; dan
  6. dermaga wisata.
- m. spa.



- (3) Bidang Usaha yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencantumannya mengacu pada ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam kelompok Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL).
- (4) Ketentuan mengenai standarisasi Bidang Usaha mengacu pada ketentuan sertifikasi usaha pariwisata.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Perizinan Berusaha**

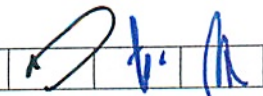
**Pasal 6**

- (1) Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:
  - a. Izin Usaha, berupa TDUP; dan
  - b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

**Bagian Kedua**  
**Permohonan dan Pendaftaran**

**Pasal 7**

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. perusahaan umum;
  - c. perusahaan umum daerah;
  - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - e. badan layanan umum;
  - f. lembaga penyiaran;
  - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - h. koperasi;
  - i. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
  - j. persekutuan firma (vennootschap onder firma); dan
  - k. persekutuan perdata.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

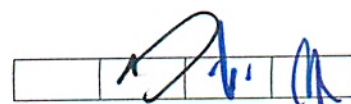


### Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan:
  - a. NIB dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
  - b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), persekutuan firma (*vennootschap onder firma*), atau persekutuan perdata; dan
  - c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

### Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
  - a. nama dan NIK;
  - b. alamat tempat tinggal;
  - c. bidang usaha;
  - d. lokasi penanaman modal;
  - e. besaran rencana penanaman modal;
  - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
  - g. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
  - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
  - i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
  - a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
  - b. bidang usaha;
  - c. jenis penanaman modal;
  - d. lokasi penanaman modal;
  - e. besaran rencana penanaman modal;
  - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
  - g. nomor kontak badan usaha;
  - h. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
  - i. NPWP Pelaku Usaha non perseorangan; dan
  - j. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.



- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

#### **Pasal 10**

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP.

#### **Pasal 11**

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

#### **Pasal 12**

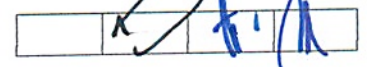
- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:
  - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
  - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 13**

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### **Pasal 14**

- (1) Lembaga OSS setelah menerbitkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sekaligus memberikan informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat oleh Pelaku Usaha sesuai



bidang usaha dan besaran rencana penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV TDUP**

##### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 15**

- (1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

##### **Bagian Kedua Penerbitan TDUP**

##### **Pasal 16**

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.

##### **Pasal 17**

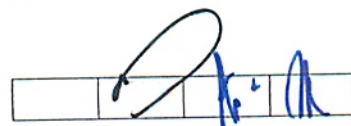
Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam Daerah.

##### **Pasal 18**

Dalam hal Pelaku Usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

##### **Pasal 19**

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada:
  - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi:
  - a. Izin Lokasi;



- b. Izin Lingkungan; dan
- c. IMB.

#### **Pasal 20**

TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan; dan
- c. IMB.

#### **Pasal 21**

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 huruf c, dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.

#### **Pasal 22**

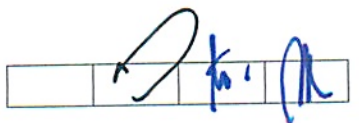
Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya sebagai berikut:

- a. untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Dokumen TDUP**

#### **Pasal 23**

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak.



## **Pasal 24**

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat berisi:

- a. NIB;
- b. bidang usaha;
- c. nama usaha pariwisata;
- d. lokasi usaha pariwisata;
- e. tanggal penerbitan TDUP; dan
- f. kode digital.

## **Bagian Keempat Biaya Penerbitan TDUP**

### **Pasal 25**

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha.

## **Bagian Kelima Pengembangan Usaha dan Pematakhiran TDUP**

### **Pasal 26**

- (1) TDUP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan Perairan di masing-masing wilayah tersebut.

### **Pasal 27**

Pelaku Usaha wajib melakukan pematakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:


- a. nama usaha pariwisata;
- b. lokasi usaha pariwisata; dan
- c. jumlah usaha pariwisata.

## **BAB V SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 28**

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.



### **Pasal 29**

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS;
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS; dan
- c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

### **Pasal 30**

(1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

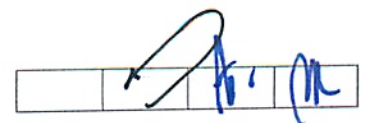
- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan;
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan; dan
- c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.

(2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

### **Pasal 31**

Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini; dan



- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 32**

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai dimaksud Pasal 30 sampai Pasal 31, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata**

#### **Pasal 33**

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Masa Berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata**

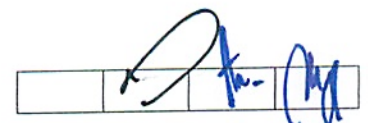
#### **Pasal 34**

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
  - b. fasilitas yang dimiliki;
  - c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
  - d. jumlah tamu/pengunjung (wisnus dan wisman);
  - e. jumlah pajak tahunan; dan/atau



- f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.

**BAB VII  
FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA**

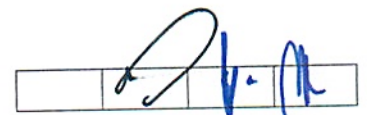
**Pasal 36**

- (1) Lembaga OSS dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring);
  - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan TDUP; dan
  - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan biaya.

**BAB VIII  
PENDIRIAN DAN AKTIVITAS USAHA BAR/PUB,  
KELAB MALAM, DISKOTIK, KARAOKE DAN  
RUMAH BILYAR**

**Pasal 37**

- (1) Lokasi usaha bar/pub, klub malam, diskotik, karaoke dan rumah biliar berjarak paling sedikit 500 meter dari rumah ibadah, sekolah dan bangunan perkantoran pemerintah dengan ketentuan mendapat persetujuan tetangga, ketua rukun tetangga di wilayahnya dan kepala desa/lurah setempat.
- (2) Lokasi usaha bar/pub, klub malam, diskotik, karaoke, dan rumah biliar didirikan di hotel dengan kelas paling rendah bintang 3 (tiga).
- (3) Terhadap usaha bar/pub, klub malam, diskotik, karaoke dan rumah biliar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur ketentuan sebagai berikut:
  - a. usia pengunjung:
    1. bar/pub, klub malam, dan diskotik, pengunjung berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas;
    2. karaoke dan rumah biliar, pengunjung berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun harus bersama orangtuanya.
  - b. dilarang menerima pengunjung berseragam sekolah.
  - c. dilarang melakukan kegiatan operasional pada tanggal 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) hari sebelum sampai dengan 1 (satu) hari sesudah hari raya keagamaan.
  - d. jam operasional pada tanggal 2 (dua) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan)/30 (tiga puluh) Ramadhan dimulai jam 21.00 sampai dengan jam 24.00.



- (4) Dikecualikan dari ketentuan pendirian dan aktivitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terhadap rumah bilyar yang didirikan oleh lembaga yang menangani olahraga dan bertujuan untuk prestasi olahraga.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 38**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata melakukan pembinaan dalam rangka perizinan berusaha sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha.

**Pasal 39**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan pengawasan untuk perizinan berusaha sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik;
  - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
  - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
  - d. pemutakhiran TDUP; dan
  - e. usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan lembaga independen sesuai bidang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

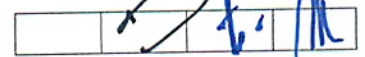
**Pasal 40**

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 41**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, yaitu sanksi administratif berupa:
- a. surat peringatan;
  - b. surat penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
  - c. pencabutan TDUP.
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata memberikan peringatan berupa teguran tertulis pertama kepada Pelaku Usaha, apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga OSS untuk melakukan pencabutan TDUP.

#### **Pasal 42**

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c dan huruf d, langsung dikenakan penutupan operasional usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

### **BAB XI**

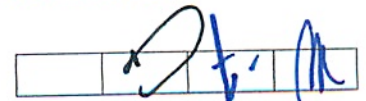
## **KOORDINASI PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Kesatu**

### **Pelaku Usaha yang Sudah Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha**

#### **Pasal 43**

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) dilaksanakan oleh Lembaga OSS.
- (3) Setelah sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja segera melaksanakan penutupan usaha pariwisata dimaksud.



**Bagian Kedua**  
**Pelaku Usaha yang Belum Memenuhi Ketentuan**  
**Perizinan Berusaha**

**Pasal 44**

- (1) Pelaku Usaha yang belum memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan dan Pelaku Usaha tidak melaksanakan ketentuan perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan maka dilakukan penutupan usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 45**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

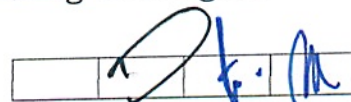
**Pasal 46**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tetap menjalankan usaha pariwisata setelah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan TDUP atau penutupan usaha dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

TDUP yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan TDUP, diproses melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 48**

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru/pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan komersial atau operasional yang baru/pengembangan usaha dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
- c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

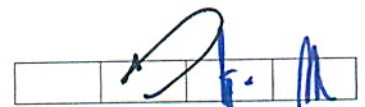
### **Pasal 49**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 100) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 220) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana, paling lambat ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 50**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 100); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 220),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



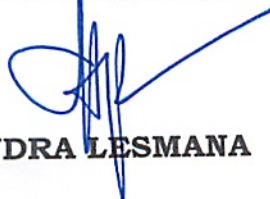
**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 12 November 2020

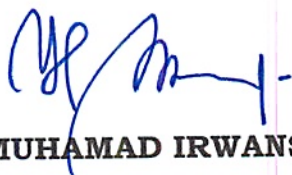
**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 12 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MUHAMAD IRWANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 195**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 04, 59/2020**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA  
DAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA**

**I. UMUM.**

Pariwisata di Kabupaten Lamandau dewasa ini tumbuh dengan pesat dan berimbas pada peningkatan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemberdayaannya. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata dalam proses pembangunan daerah berupa pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan sosial budaya, dan pembentukan citra daerah.

Pariwisata merupakan kegiatan multisektor dan tanpa batasan, yang berarti bahwa pariwisata berkaitan dengan bermacam-macam sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan budaya dalam berbagai skala, misalnya perhotelan, perdagangan, transportasi, jasa, dan lain-lain. Pesatnya pertumbuhan pariwisata tersebut berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha di bidang kepariwisataan.

Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pelayanan prima tersebut perlu dukungan:

1. Personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Ketersediaan anggaran;
4. Manajemen/pengorganisasian yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
5. Regulasi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

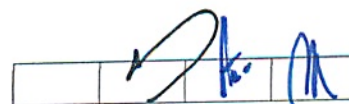
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.



Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a

Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Angka 1

Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi, dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Angka 2

Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Angka 3

Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.

Angka 4

Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.

Angka 5

Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.

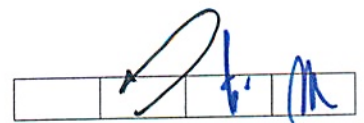
Angka 6

Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.

huruf b

Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan. Penetapan Kawasan Pariwisata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Induk Pariwisata Daerah.

huruf c



Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Angka 1

Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Angka 2

Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

huruf d

Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

Angka 1

Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Angka 2

Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan Penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

huruf e

Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.

Angka 1

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Angka 2

Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Angka 3

Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Angka 4

Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan,



dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

Angka 5

Bar/Pub adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Angka 6

Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

huruf f

Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Angka 1

Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesangrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Angka 2

Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Angka 3

Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

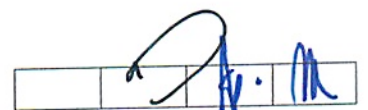
Angka 4

Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.

Angka 5

Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.

Angka 6



Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

Angka 7

Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.

huruf g

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Angka 1

Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas, dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Angka 2

Jasa Impresariat / Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Angka 3

Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi, dan mempromosikan karya seni, kriya, dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.

Angka 4

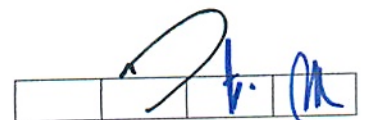
Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat didalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.

Angka 5

Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Angka 6

Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.





#### Angka 19

Panti/Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

#### huruf h

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

#### huruf i

Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

#### huruf j

Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

#### huruf k

Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

#### huruf l

Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.

#### Angka 1

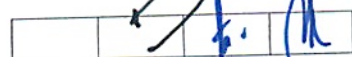
Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

#### Angka 2

Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

#### Angka 3

Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu, dan



aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.

Angka 4

Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.

Angka 5

Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.

Angka 6

Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.

huruf m

Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

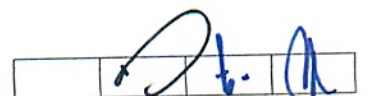
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13



Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

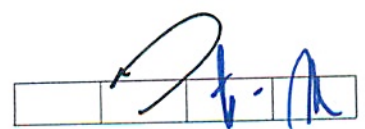
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)

Surat teguran dan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Ayat (2)

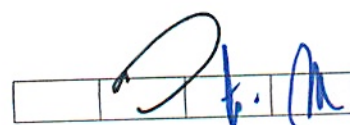
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menyampaikan tembusan pencabutan TDUP kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditindaklanjuti.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45



Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 242**